



EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK

<https://jurnal1.uinssc.ac.id/index.php/equalita>

Published by Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas LP2M
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Normalisasi Victim Blaming melalui Narasi Salah Pakaian dalam Kasus Pelecehan Seksual: Analisis Feminisme Radikal

Rezandra Maulia Nadika¹, Ahmad Ridwan², Refti Handini Listyani³

¹ Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

² Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

³ Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis narasi “salah pakaian” sebagai praktik victim blaming dalam kasus pelecehan seksual serta mekanisme normalisasi wacana tersebut dalam masyarakat Indonesia. Subjek penelitian terdiri dari sepuluh informan yang dipilih melalui purposive sampling berdasarkan pengalaman mereka terkait interaksi sosial yang mengandung unsur penyalahkan korban. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami pengalaman dan pemaknaan informan, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi salah pakaian berfungsi sebagai alat sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami, sementara pelaku luput dari sorotan. Pemaknaan pakaian sebagai indikator moralitas perempuan memperkuat kontrol patriarki dan reproduksi norma sosial yang menormalisasi victim blaming. Narasi ini terus diperkuat melalui percakapan sehari-hari, media, dan transmisi lintas generasi sehingga pengalaman individual diubah menjadi kebenaran umum. Perspektif feminisme radikal menegaskan bahwa victim blaming adalah mekanisme struktural yang mempertahankan dominasi laki-laki dengan menekankan tanggung jawab pencegahan kekerasan sepenuhnya pada perempuan. Temuan ini menekankan perlunya intervensi sosial, pendidikan publik, dan kebijakan berbasis kesadaran gender untuk mengubah pola pikir masyarakat, memfokuskan penegakan keadilan pada pelaku, dan melindungi korban dari stigma sosial.

Kata Kunci: Victim blaming; Pelecehan seksual; Pakaian; Feminisme radikal.

ABSTRACT: This study aims to analyze the narrative of “wrong clothing” as a form of victim blaming in sexual harassment cases and the mechanism of its normalization within Indonesian society. The study involved ten informants selected through purposive sampling based on their experience with social interactions containing elements of victim blaming. A qualitative descriptive approach was employed to explore informants’ experiences and interpretations, with data collected through in-depth interviews and analyzed using discourse analysis. Findings indicate that the “wrong clothing” narrative functions as a social tool that positions women as responsible for the violence they experience, while perpetrators remain unnoticed. Clothing is interpreted as a moral indicator, reinforcing patriarchal control and normalizing victim blaming through everyday conversations, media representations, and intergenerational transmission, converting individual experiences into generalized truths. Radical feminist perspectives highlight that victim blaming operates as a structural mechanism sustaining male dominance by placing the burden of preventing violence solely on women. The study underscores the importance of social interventions, public education, and gender-sensitive policies to shift societal mindset, focus justice enforcement on perpetrators, and protect victims from social stigma.

Keywords: Victim blaming; Sexual harassment; Clothing; Radical feminis.

1. PENDAHULUAN

Fenomena victim blaming dalam kasus pelecehan seksual masih menjadi bagian dari kultur sosial yang mengakar kuat di berbagai ruang kehidupan masyarakat Indonesia. Narasi yang mengaitkan cara berpakaian perempuan dengan tindakan pelecehan kerap digunakan sebagai alat untuk mempersoalkan moralitas korban dan mengalihkan perhatian dari tindakan pelaku. Proses ini menciptakan kondisi yang menempatkan korban sebagai sumber masalah. Pandangan yang menghubungkan pakaian dengan pelecehan masih banyak ditemui dan membentuk pola pikir yang cenderung memindahkan tanggung jawab dari pelaku ke korban (Afredo, Khoerunnisa, Fitriani, & Astuti, 2023). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap tubuh perempuan terus direproduksi melalui norma sosial yang mengatur bagaimana perempuan seharusnya tampil di ruang publik.

Pandangan yang menghubungkan pelecehan dengan perilaku atau penampilan korban bersumber dari norma sosial yang menempatkan perempuan pada standar moral tertentu. Menurut Wijayanti & Suarya (2023) konstruksi budaya tersebut membuat perempuan berada dalam posisi mudah disalahkan ketika dianggap tidak mematuhi aturan tak tertulis mengenai sopan santun atau batas-batas perilaku. Kerangka berpikir seperti itu menyebabkan pelecehan dipahami sebagai akibat dari penyimpangan perilaku korban, bukan tindakan pelaku yang melanggar batas. Akibatnya, ruang sosial yang seharusnya melindungi korban justru menambah beban psikologis yang mereka alami, terutama ketika proses penyampaian pengalaman direspons dengan penilaian negatif.

Reproduksi victim blaming juga berkembang melalui percakapan di lingkungan keluarga, komunitas, institusi pendidikan, hingga media digital. Menurut Shopiani, Wilodati, & Supriadi (2021) kecenderungan menyalahkan korban sering muncul dalam interaksi sehari-hari, baik melalui komentar verbal maupun sikap yang meragukan pengalaman korban. Proses ini memperburuk ketidaknyamanan korban untuk melapor atau mencari dukungan. Penekanan yang berulang dari lingkungan dekat turut mempersempit ruang aman bagi korban untuk menyuarakan pengalaman mereka, sehingga pelecehan tidak hanya menjadi pengalaman traumatis tetapi juga memunculkan ketakutan akan stigma sosial.

Victim blaming turut diperkuat oleh pengetahuan yang keliru mengenai relasi kuasa dalam kekerasan seksual. Pola penalaran yang mengaitkan perilaku korban dengan pelecehan membuat proses pencarian keadilan tidak berjalan semestinya. Menurut Sulistyawan dkk. (2023) penilaian terhadap pakaian perempuan kerap digunakan untuk membangun narasi moral

yang menguntungkan pelaku. Bahasa hukum informal yang berkembang di masyarakat sering mempolitisasi tubuh perempuan, sehingga tindakan kekerasan dianggap dapat dicegah jika perempuan mematuhi aturan berpakaian tertentu. Pemaknaan semacam itu mereduksi kompleksitas kekerasan seksual menjadi persoalan etika personal, bukan pelanggaran hak.

Persepsi masyarakat mengenai pelecehan seksual juga dipengaruhi oleh representasi media. Pemberitaan mengenai kekerasan kerap menempatkan korban sebagai pihak yang memicu tindakan tersebut melalui cara berpakaian atau perilaku sosial (Ihsani, 2021). Media yang menyajikan informasi tanpa kerangka sensitif gender cenderung memperkuat stereotip bahwa korban memiliki peran dalam terjadinya kekerasan. Adhrianti, Yayantika, & Marlina (2024) menambahkan bahwa bahasa dan narasi yang dipilih media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Ketika pemberitaan menggunakan frasa yang menyoroti perilaku korban, masyarakat terdorong untuk menilai bahwa korban berkontribusi terhadap pengalaman kekerasan yang mereka alami. Kondisi ini semakin memperkuat pola pikir yang merugikan korban.

Kecenderungan menyalahkan korban tidak hanya merusak kondisi psikologis korban, tetapi juga memengaruhi proses pemulihan dan penegakan hukum. Penilaian sosial yang menyudutkan membuat korban merasa tidak didukung dan enggan melaporkan kasus kekerasan. Sikap menyalahkan korban berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menjaga moralitas sehingga korban menanggung stigma ganda berupa trauma dan tekanan sosial yang menghambat akses terhadap keadilan (Maruf dan rekan, 2023). Dampak *victim blaming* juga tampak pada aspek sosial yang lebih luas karena tekanan yang dialami korban dapat berupa pengucilan, kerentanan relasi sosial, serta hilangnya rasa aman di lingkungan yang seharusnya memberi perlindungan (Kusuma, Savana, Devi, & Agustine, 2025). Situasi ini memperlihatkan bahwa pelecehan seksual bukan sekadar tindakan individual, tetapi persoalan struktural yang diperkuat oleh norma sosial bias gender.

Kajian sebelumnya menegaskan bahwa anggapan mengenai pakaian sebagai pemicu pelecehan tidak didukung bukti empiris. Objektifikasi tubuh perempuan mengurangi empati terhadap korban (Awasthi, 2017). Kepercayaan terhadap dunia yang adil juga mendorong masyarakat menyalahkan korban, karena dianggap bahwa kejadian buruk terjadi akibat perilaku mereka sendiri (Johnson & Workman, 1994). Studi lain menunjukkan bahwa masyarakat menafsirkan pelecehan sebagai akibat tindakan korban sehingga pelaku seolah hanya

merespons situasi yang dipicu perempuan (Wulandari & Krisnani, 2020). Kebiasaan menyalahkan korban bertahan karena terus direproduksi dalam interaksi sehari-hari, baik melalui komentar singkat maupun penilaian spontan (Azizah, Alia, Retsa, & Mujayapura, 2025). Meski begitu, penelitian yang menelaah bagaimana narasi salah pakaian diproduksi, direproduksi, dan dilegitimasi sebagai kebenaran sosial masih terbatas.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan pada proses normalisasi wacana salah pakaian dalam praktik victim blaming. Analisis wacana digunakan untuk menelusuri struktur bahasa dan pola narasi, sedangkan perspektif feminisme radikal membantu memahami relasi kuasa patriarki yang memengaruhi penilaian terhadap tubuh perempuan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi kedua pendekatan tersebut, sehingga memungkinkan penelusuran logika kuasa di balik narasi moral mengenai pakaian perempuan.

Permasalahan penelitian difokuskan pada tiga hal. Pertama, bagaimana narasi salah pakaian terbentuk dan dinormalisasi dalam praktik victim blaming. Kedua, bagaimana informan memaknai hubungan antara pakaian korban dan tindakan pelecehan. Ketiga, bagaimana teori feminisme radikal menjelaskan operasi kuasa patriarki di balik narasi tersebut. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pola narasi salah pakaian, menganalisis proses normalisasi wacana, dan menafsirkan temuan melalui kerangka feminisme radikal. Tujuan ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai cara kerja wacana victim blaming dalam memperkuat struktur patriarki dan membentuk pandangan masyarakat terhadap pelecehan seksual.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami secara mendalam proses pembentukan dan normalisasi narasi salah pakaian dalam praktik victim blaming. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap pengalaman, pemaknaan, serta konteks sosial yang melingkupi cara informan memandang hubungan antara pakaian korban dan tindakan pelecehan. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari tujuh perempuan dan tiga laki-laki, dipilih melalui teknik purposive sampling yang mempertimbangkan pengalaman mereka dalam menyaksikan atau terlibat dalam percakapan yang mengandung unsur victim blaming.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedoman pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan menguraikan pengalaman dan pandangannya secara detail. Wawancara berlangsung antara tiga puluh hingga lima puluh menit, dilakukan di lokasi yang

disepakati bersama, dan seluruh proses mengikuti prinsip etika penelitian seperti informed consent dan kerahasiaan identitas. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis wacana untuk menelusuri struktur bahasa, pola narasi, serta relasi kuasa yang membentuk pemaknaan tentang pakaian dan pelecehan seksual. Proses analisis dimulai dengan melakukan transkripsi penuh hasil wawancara, diikuti tahap reduksi data untuk menyeleksi pernyataan yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap temuan kemudian dikategorikan berdasarkan pola naratif yang muncul, baik dalam bentuk penilaian moral, reproduksi norma sosial, maupun legitimasi terhadap perilaku pelaku. Interpretasi akhir dilakukan dengan menggunakan kerangka feminisme radikal untuk memahami bagaimana logika patriarki bekerja dalam membentuk wacana salah pakaian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Narasi Victim Blaming “Salah Pakaian”

Pemaknaan mengenai hubungan antara pakaian dan pelecehan seksual menunjukkan bahwa narasi ini telah hidup dalam struktur berpikir masyarakat dan digunakan sebagai penjelasan yang dianggap wajar ketika menilai peristiwa kekerasan seksual. Cara pandang tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan memegang tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan dirinya melalui cara berpakaian. Ketika pelecehan terjadi, perhatian masyarakat cenderung diarahkan kepada perilaku korban dibandingkan tindakan pelaku sehingga perempuan ditempatkan sebagai pihak yang dianggap harus mengantisipasi risiko.

Mekanisme menyalahkan korban ini bekerja karena masyarakat sering mencari penjelasan sederhana untuk meredakan ketidaknyamanan sosial. Pakaian dianggap sebagai alasan yang paling mudah diterima sehingga memunculkan ilusi bahwa pelecehan dapat dicegah apabila perempuan mematuhi aturan berpakaian tertentu. Logika tersebut menutupi ketimpangan relasi kuasa yang sesungguhnya menjadi akar terjadinya pelecehan. Narasi ini kemudian berkembang menjadi penjelasan umum yang tampak masuk akal meskipun tidak didukung fakta empiris.

Reproduksi narasi salah pakaian berlanjut melalui interaksi sehari-hari, terutama dalam bentuk komentar atau nasihat moral. Informan menyebutkan bahwa komentar mengenai pakaian hampir selalu muncul ketika terjadi kasus pelecehan. Penilaian moral tersebut tidak selalu disampaikan secara langsung sebagai tuduhan, tetapi sering hadir sebagai bentuk kepedulian

sosial yang dipahami sebagai hal lumrah. Situasi ini menjadikan victim blaming sebagai bagian dari kebiasaan sosial yang terus diwariskan.

Seluruh pola tersebut menegaskan bahwa narasi salah pakaian merupakan bagian dari struktur budaya yang lebih besar. Ketika masyarakat menormalisasi penyalahkan korban, mereka memindahkan tanggung jawab dari pelaku ke korban dan memperkuat gagasan bahwa perempuan harus menyesuaikan diri demi menghindari kekerasan seksual. Pernyataan informan bahwa “pas ada kejadian pelecehan pasti yang disorot duluan justru korbannya” menunjukkan bagaimana narasi salah pakaian melekat sebagai pola pikir kolektif yang mengabaikan relasi kuasa dan mengalihkan perhatian dari tindakan pelaku.

B. Pakaian sebagai Instrumen Penilaian Moral

Pemaknaan pakaian sebagai ukuran moralitas perempuan tampak jelas dalam cara informan menilai hubungan antara pilihan berbusana dan risiko pelecehan seksual. Penjelasan mereka memperlihatkan bahwa pakaian tidak dipahami sekadar sebagai bagian dari ekspresi diri, tetapi sebagai indikator yang dipakai masyarakat untuk menilai apakah seorang perempuan dianggap layak dihormati atau sebaliknya. Konsep ini sejalan dengan analisis feminisme radikal yang menyatakan bahwa patriarki mengontrol tubuh perempuan melalui aturan moral yang dilegitimasi sebagai norma sosial. Narasi moral yang mengikat pakaian perempuan ini berfungsi untuk menjaga dominasi laki-laki dengan cara menempatkan perempuan sebagai pihak yang wajib patuh pada standar kepantasan yang ditentukan masyarakat.

Konstruksi tersebut muncul kuat dalam wawancara, terutama ketika informan mengamati bagaimana masyarakat merespons korban pelecehan. Informan menggambarkan bahwa pakaian sering dianggap sebagai penyebab utama terjadinya pelecehan, meskipun bukti-bukti justru menunjukkan sebaliknya. Ia menyebut bahwa banyak korban yang memakai pakaian tertutup tetap menjadi sasaran pelecehan.

“aku sering nemu di medsos, baca bacain komen orang-orang, kebanyakan nyalahin model pakaiannya yang terlalu terbuka lah, bahkan ada pun korban yang pakaiannya rapih, sopan, dan syar’i gitu juga tetep kena pelecehan, mereka yang berpakaian sopan pun masih dapet komentar.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sering kali menyederhanakan persoalan kekerasan seksual dengan mereduksinya pada penampilan perempuan.

Stigma moral yang dilekatkan pada pakaian bekerja sebagai penandaan sosial. Informan menggambarkan bahwa perempuan dengan pakaian yang dianggap tidak sesuai standar kepantasan langsung diberi label negatif. Temuan Afredo dkk. (2023) menunjukkan bahwa masyarakat masih mengaitkan pakaian perempuan dengan karakter moral dan tingkat “kesopanan”, sehingga tubuh perempuan menjadi objek kontrol sosial. Dalam perspektif feminisme radikal, pola ini memperlihatkan bahwa perempuan dinilai bukan berdasarkan tindakan mereka, tetapi berdasarkan kesesuaian mereka terhadap norma moral yang dilegitimasi sebagai aturan sosial, sehingga tubuh perempuan dikonstruksi sebagai sumber masalah.

Pengalaman informan menunjukkan bahwa narasi moral tentang pakaian tidak hanya digunakan untuk mengomentari korban pelecehan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyampaikan bahwa perempuan sering ditegur atau dinilai hanya dari pakaian mereka, bahkan di luar konteks kekerasan. Penjelasan ini membuktikan bahwa fungsi pakaian sebagai alat kontrol sosial telah meresap dalam praktik sosial masyarakat. Dinamika tersebut mencerminkan gagasan feminisme radikal tentang bagaimana patriarki mempertahankan kekuasaannya melalui pembiasaan norma yang tampak seperti aturan “alami”, padahal merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan perempuan. Apa yang tampak sebagai nasihat moral berfungsi memastikan bahwa perempuan tetap berada dalam batas tubuh yang dianggap aman oleh masyarakat.

Kecenderungan menjadikan pakaian sebagai penanda moral sekaligus mekanisme kontrol memperlihatkan bagaimana masyarakat mengalihkan tanggung jawab pelecehan kepada perempuan. Dengan demikian, pakaian diperlakukan bukan sekadar objek visual, tetapi perangkat simbolik yang menempatkan perempuan pada posisi rentan. Dalam perspektif feminisme radikal, kondisi ini menunjukkan bahwa narasi salah pakaian merupakan bagian dari sistem kekuasaan yang memaksa perempuan memikul tanggung jawab moral yang tidak seharusnya dibebankan kepada mereka. Hubungan antara moralitas, pakaian, dan beban sosial ini memperkuat pemahaman bahwa *victim blaming* bukan sekadar kesalahpahaman, tetapi mekanisme struktural yang melanggengkan ketidaksetaraan gender.

C. Reproduksi Victim Blaming dalam Lingkungan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, narasi “salah pakaian” sebagai bentuk *victim blaming* dalam kasus pelecehan seksual muncul dari pola pikir masyarakat yang masih sangat patriarki, di mana perempuan dianggap bertanggung jawab untuk menjaga diri, perilaku, dan

penampilan agar tidak menimbulkan risiko pelecehan. Keyakinan ini menempatkan korban sebagai pihak yang harus dikontrol, sementara pelaku sering luput dari perhatian. Masyarakat cenderung mencari alasan untuk merasa aman secara psikologis dengan berpikir bahwa pelecehan hanya terjadi jika korban melakukan “kesalahan” tertentu. Mekanisme ini memunculkan narasi yang salah kaprah, seolah-olah tindakan pelecehan dapat dicegah dengan berpakaian tertentu atau bersikap “lebih berhati-hati”.

Pandangan mengenai hubungan antara pakaian korban dan pelecehan seksual menegaskan bahwa pakaian bukan faktor determinan. Pelecehan lebih dipengaruhi oleh niat, persepsi, dan pola pikir pelaku yang melihat perempuan sebagai objek yang bisa dikontrol. Banyak kasus menunjukkan korban berpakaian tertutup, syar'i, mengenakan seragam sekolah, atau bahkan mukena tetap menjadi sasaran pelecehan. Komentar publik yang menyalahkan pakaian korban muncul karena masyarakat belum memahami esensi kekerasan seksual sebagai masalah kuasa dan dominasi, bukan sekadar daya tarik atau provokasi seksual.

Keberlanjutan narasi victim blaming dalam masyarakat didorong oleh kebiasaan dan stereotip gender yang mengakar. Narasi ini tidak hanya dianggap wajar, tetapi juga diteruskan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Dampak terhadap korban sangat signifikan. Korban sering merasa bersalah, malu, takut menyuarakan pengalaman mereka, dan mengalami tekanan psikologis tambahan. Kondisi ini memperkuat ketakutan korban untuk melapor atau mencari keadilan, sehingga tindakan pelecehan sulit diberantas secara menyeluruh. Narasi yang menyalahkan korban justru menjadi bentuk kekerasan tambahan, karena menempatkan korban pada posisi yang terus-menerus dikritik dan disalahkan.

Secara keseluruhan, faktor utama terjadinya pelecehan seksual terletak pada pelaku, bukan pada korban atau cara berpakaian mereka. Narasi yang menyalahkan korban mencerminkan ketidakadilan gender dan memperkuat budaya patriarki yang menghambat perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap kekerasan seksual menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis ganda, sementara pelaku tetap bebas dari tanggung jawab moral yang seharusnya menjadi fokus utama penanganan kasus.

D. Mekanisme Normalisasi: Dari Kasus Individual menjadi Kebenaran Umum

Normalisasi narasi salah pakaian terjadi ketika penjelasan dari pengalaman individual diubah menjadi kebenaran yang dianggap berlaku bagi semua perempuan. Banyak orang langsung menyimpulkan pakaian sebagai penyebab pelecehan tanpa mengetahui kondisi sebenarnya. Seorang informan mengatakan “kadang belum tahu cerita aslinya, tapi sudah ngomong pantes diganggu kalau bajunya begitu,” yang menunjukkan bahwa masyarakat memulai analisis dari asumsi moral, bukan fakta peristiwa. Normalisasi ini membuat penyebab utama, yaitu tindakan pelaku, terabaikan.

Normalisasi berjalan efektif karena narasi tersebut diperlakukan sebagai aturan umum yang dianggap mampu menjelaskan kasus apa pun. Informan lain menyampaikan bahwa orang sering mengulang nasihat seperti “kalau perempuan jaga pakaian ya aman,” meskipun pelecehan juga dialami perempuan dengan pakaian tertutup. Norma lebih kuat daripada fakta sehingga pandangan ini tetap bertahan meskipun berulang kali bertentangan dengan kenyataan. Situasi ini sejalan dengan penjelasan Azizah dkk. (2025) bahwa generalisasi moral digunakan untuk mempertahankan stabilitas sosial versi patriarki.

Normalisasi juga tampak dari pernyataan informan yang mengetahui bahwa pelecehan tetap bisa terjadi pada perempuan yang berpakaian sopan, namun tetap meyakini bahwa perempuan harus menghindari pakaian tertentu agar tidak menimbulkan masalah. Informan mengatakan “pelaku tetap salah, tapi perempuan ya tetap jaga lah, biar aman.” Kontradiksi ini menunjukkan bahwa tekanan sosial terhadap perempuan lebih kuat daripada kesadaran bahwa tanggung jawab utama ada pada pelaku.

Normalisasi bekerja melalui transmisi nilai yang muncul dari pengalaman kolektif. Informan menjelaskan bahwa nasihat tentang pakaian tidak didasarkan pada kejadian tertentu, tetapi berasal dari cerita umum yang didengar sejak kecil. Seorang informan mengatakan “sejak sekolah sudah sering dengar kalau perempuan itu harus jaga cara berpakaian, biar tidak diganggu,” yang menunjukkan bahwa narasi salah pakaian hidup sebagai pengetahuan sosial yang diwariskan dan jarang dipertanyakan.

Interpretasi melalui feminisme radikal memperlihatkan bahwa mekanisme normalisasi tersebut merupakan cara patriarki mempertahankan kekuasaan. Ketika narasi salah pakaian diterima sebagai kebenaran umum, kontrol sosial terhadap perempuan menjadi semakin kuat karena perempuan selalu diawasi dan dinilai berdasarkan penampilannya. Informan menggambarkan ketakutan memilih pakaian karena khawatir mendapat komentar negatif. Situasi ini menunjukkan bahwa normalisasi victim blaming bukan hanya proses wacana,

tetapi juga penaklukan simbolik yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan dan harus selalu menyesuaikan diri dengan norma patriarkal.

E. Dampak Psikologis dan Sosial dari Narasi Salah Pakaian

Narasi yang menyalahkan pakaian korban memberikan tekanan psikologis yang berat bagi perempuan. Banyak perempuan enggan bercerita tentang pelecehan karena khawatir pertanyaan pertama yang muncul adalah soal pakaian mereka. Informan menyebut, perhatian masyarakat lebih tertuju pada perilaku korban daripada kekerasan yang dialaminya. Tekanan ini menimbulkan rasa malu, bersalah, dan ketakutan untuk melapor, sehingga korban sering memilih diam. Beberapa perempuan bahkan menginternalisasi rasa bersalah meskipun tidak ada hubungan antara pakaian dan pelecehan yang terjadi, memperkuat kontrol patriarki melalui mekanisme psikologis.

Dampak sosial dari narasi ini terlihat dalam pengawasan terus-menerus terhadap tubuh perempuan di ruang publik. Perempuan muda menjadi target utama, dengan nasihat dan teguran terkait pakaian yang muncul sejak dini. Situasi ini menimbulkan kecemasan kolektif dan membentuk norma sosial di mana perempuan selalu merasa harus menyesuaikan diri dengan standar moral yang tidak jelas. Narasi ini secara tidak langsung memperkuat victim blaming karena keselamatan perempuan dipandang bergantung pada kehati-hatian pribadi, bukan pada tanggung jawab pelaku atau sistem sosial.

Sebagian laki-laki menilai norma berpakaian sopan dapat melindungi perempuan, namun banyak juga yang menegaskan bahwa narasi ini justru menambah trauma korban karena fokus masyarakat bergeser dari pelaku ke korban. Perempuan diposisikan sebagai objek yang harus selalu mematuhi standar moral patriarki, sementara perilaku laki-laki jarang dikritik secara setara. Dampak psikologis dan sosial ini membentuk struktur yang memperkuat ketidaksetaraan gender dan mempertahankan dominasi patriarki dalam masyarakat. Narasi salah pakaian bukan sekadar komentar, tetapi mekanisme sosial yang membatasi kebebasan perempuan dan memperburuk pengalaman korban pelecehan.

F. Pembacaan Kritis melalui Feminisme Radikal

Pemaknaan kritis terhadap narasi salah pakaian yang muncul dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wacana tersebut bekerja sebagai mekanisme sosial yang mengatur tubuh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Informan menggambarkan bahwa penilaian terhadap pakaian perempuan muncul bahkan ketika tidak ada peristiwa pelecehan. Salah satu informan menyatakan bahwa “orang selalu punya komentar tentang baju perempuan,

meskipun tidak terjadi apa apa,” yang memperlihatkan bahwa tubuh perempuan kerap diposisikan sebagai ruang publik yang bebas dinilai. Temuan ini sejalan dengan analisis Lestari (2019) yang melihat bahwa praktik menyalahkan korban berakar pada konstruksi sosial yang menempatkan tubuh perempuan sebagai objek pemantauan moral. Perspektif feminisme radikal membaca kondisi semacam ini sebagai bagian dari kerja patriarki yang menormalisasi pengawasan terhadap tubuh perempuan agar selalu sesuai dengan standar moral yang ditetapkan laki laki.

Penjelasan informan mengenai respons masyarakat terhadap kasus pelecehan memperkuat pandangan bahwa narasi salah pakaian berfungsi mengalihkan fokus dari pelaku. Seorang informan menjelaskan bahwa dalam kasus pelecehan, “orang malah tanya bajunya apa, bukan tanya pelecehannya bagaimana.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perempuan ditempatkan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan kekerasan yang diterimanya, sementara pelaku justru luput dari sorotan. Studi Jacobus, Pali, & Opod (2025) menunjukkan pola serupa, bahwa banyak orang cenderung memusatkan analisis pada perilaku korban daripada perilaku pelaku. Feminisme radikal memandang dinamika ini sebagai bentuk relasi kuasa yang memindahkan tanggung jawab dari laki laki sebagai pelaku kekerasan menuju perempuan sebagai objek yang dinilai.

Struktur bahasa yang digunakan informan ketika menggambarkan perilaku korban juga memperlihatkan bagaimana victim blaming dilegitimasi melalui ungkapan sehari hari. Informan sering memakai frasa seperti “dia juga pakaiannya begitu” atau “wajar kalau digoda,” yang mengandung penilaian moral terselubung. Penggunaan bahasa seperti ini berfungsi merasionalisasi kesalahan dan menempatkan perempuan sebagai penyebab terjadinya pelecehan. Dalam kerangka feminisme radikal, bahasa semacam ini berfungsi sebagai alat simbolik untuk menormalkan subordinasi perempuan.

Internalisasi nilai patriarki juga tampak jelas dalam pengalaman informan perempuan yang mengaku pernah menegur perempuan lain terkait pakaian meskipun mereka sendiri tidak sepenuhnya setuju dengan logika tersebut. Salah satu informan menyampaikan bahwa “saya kadang ikut menegur, takut nanti dinilai tidak peduli,” mengindikasikan bahwa tindakan itu dilakukan bukan karena keyakinan pribadi, tetapi karena tekanan sosial yang beroperasi melalui norma yang telah berlangsung lama. Feminisme radikal menyebut fenomena ini sebagai wujud kepatuhan yang terbentuk dari tekanan budaya, bukan pilihan bebas.

Kerangka feminisme radikal dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa narasi salah pakaian bukan hanya stereotip sosial, tetapi instrumen ideologis yang mempertahankan ketimpangan gender. Informan menggambarkan bahwa perempuan selalu berada dalam posisi untuk mengatur penampilan agar terhindar dari penghakiman moral, bahkan ketika mereka tidak melakukan apa apa. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban pencegahan pelecehan diletakkan sepenuhnya kepada perempuan, sementara pelaku tidak diharuskan mengubah perilakunya. Analisis Wijayanti & Suarya (2023) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa victim blaming yang berulang menghambat pemahaman masyarakat tentang akar kekerasan seksual yang sebenarnya, yaitu relasi kuasa yang timpang. Pembacaan kritis ini menegaskan bahwa pelecehan seksual tidak dapat dipahami sebagai peristiwa individual, melainkan bagian dari sistem sosial yang memungkinkan dominasi laki laki dipertahankan melalui pengawasan terus menerus terhadap tubuh perempuan.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa narasi “salah pakaian” dalam praktik victim blaming merupakan konstruksi sosial yang kuat dan terus direproduksi melalui interaksi sehari-hari. Persepsi yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelecehan seksual memperlihatkan dominasi patriarki, di mana tubuh perempuan dijadikan objek pengawasan dan pengendalian melalui standar moral dan norma berpakaian. Fokus masyarakat yang lebih tertuju pada perilaku atau penampilan korban daripada tindakan pelaku menyebabkan pelecehan dipahami secara keliru sebagai akibat kesalahan korban. Proses ini diperkuat oleh transmisi nilai sosial lintas generasi, representasi media yang tidak sensitif gender, serta bahasa sehari-hari yang merasionalisasi tanggung jawab perempuan atas kekerasan yang dialaminya. Normalisasi narasi salah pakaian membuat pengalaman individual dianggap sebagai kebenaran umum, meskipun fakta empiris menunjukkan pelecehan dapat terjadi pada perempuan dengan berbagai jenis pakaian. Dampak psikologis yang muncul berupa rasa malu, bersalah, dan ketakutan untuk melapor, sementara tekanan sosial memperkuat internalisasi norma patriarki dan ketidaksetaraan gender.

Analisis melalui perspektif feminisme radikal menegaskan bahwa victim blaming bukan sekadar kesalahpahaman sosial, melainkan mekanisme struktural yang mempertahankan dominasi laki-laki dengan menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus selalu menyesuaikan diri. Bahasa, norma sosial, dan praktik pengawasan tubuh perempuan

menegaskan relasi kuasa patriarki, di mana tanggung jawab pencegahan kekerasan sepenuhnya dibebankan kepada korban. Temuan ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual adalah bagian dari sistem sosial yang mereproduksi ketimpangan gender dan menormalisasi pengalihan tanggung jawab dari pelaku ke korban. Pemahaman tersebut membuka peluang bagi intervensi sosial, pendidikan publik, dan kebijakan berbasis kesadaran gender untuk menekan budaya victim blaming, mengubah pola pikir masyarakat, dan menempatkan fokus penegakan keadilan pada pelaku, bukan korban.

REFERENSI

- Adhrianti, L., Yyantika, & Marlina, N. C. (2024). Peran Media Terhadap Fenomena Victim-Blaming dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender. *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital*, 141–150. <https://doi.org/10.29313/JRJMD.V4I2.4334>
- Afredo, A., Khoerunnisa, A. R., Fitriani, A., & Astuti, N. F. (2023). Persepsi Mahasiswa Tangerang Mengenai Victim Blaming Dalam Pelecehan Seksual. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/176>
- Awasthi, B. (2017). From Attire to Assault: Clothing, Objectification, and De-humanization - A Possible Prelude to Sexual Violence? *Frontiers in psychology*, 8(MAR). <https://doi.org/10.3389/FPSYG.2017.00338>
- Azizah, S. N., Alia, M. N., Retsa, M., & Mujayapura, R. (2025). Fenomena Victim Blaming dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk yang Terus Dinormalisasi. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2361–2368. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025>
- Ihsani, S. N. (2021). Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.22146/JWK.2239>
- Jacobus, E. D., Pali, C., & Opod, H. (2025). Pandangan Mahasiswa pada Salah Satu Institusi di Sulawesi Utara terhadap Victim Blaming dalam Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 8–8. <https://doi.org/10.47134/PJP.V2I2.3603>
- Johnson, K. K. P., & Workman, J. E. (1994). Blaming the Victim: Attributions Concerning Sexual Harassment Based on Clothing, Just-World Belief, and Sex of Subject. *Home Economics Research Journal*, 22(4), 382–400. <https://doi.org/10.1177/0046777494224002;Requestedjournal:Journal:15523934A>
- Kusuma, F. A., Savana, E. A., Devi, S., & Agustine, Y. F. (2025). Analisis Studi Kasus Dampak Sosiologis terhadap Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.55123/SOSMANIORA.V4I1.4927>
- Lestari, A. P. (2019). Blaming the Victim: Alienasi Gender dalam Media Online. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(2), 197–213. <https://doi.org/10.21580/JID.V39.2.3999>
- Maruf, B., Fahira, N., Nadiroh, A., Mulyati, S., Sari, Y., Sakinah, A., Maulia, S., Gunawan, A., Muryani, V., & Lutfiyah, Q. (2023). Sikap Victim Blaming Erat Kaitannya Pada Korban Pelecehan Seksual. *Pendidikan Karakter Unggul*. <https://karakter.esaunggul.ac.id/index.php/pku/article/view/97>

- Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenonema Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(1), 13–26. <https://doi.org/10.17509/SOSIETAS.V11I1.36089>
- Sulistiyawan, A. Y., Adawiyah, R., Fernanda, S. A., & Prabandari, A. P. (2023). Kekerasan Seksual dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2), 259–276. <https://doi.org/10.26623/JIC.V8I2.6093>
- Wijayanti, N. S. T. P. L., & Suarya, L. M. K. S. (2023). Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual: Kajian Literatur. *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, 7(1), 12–20. <https://doi.org/10.36341/PSI.V7I1.3072>
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share : Social Work Journal*, 10(2), 187–197. <https://doi.org/10.24198/SHARE.V10I2.31408>